

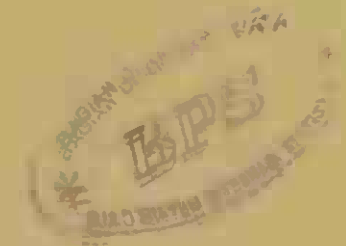
**BPS**

Perwakilan Biro Pusat Statistik  
KANTOR STATISTIK PROPINSI JAWA TIMUR  
Jl. Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Rungkut, Surabaya  
Telepon 8411735 8438526, 8438611, 8438873, 8439343

LABEL SEMENTARA SENSUS BARANG 2014			
Ruang	ID	Lokasi	Petugas
B2102	123.0814.8647-1	BB 24	FAP

WILDA : 35000.000

ISBN : 979.4877778  
35541.96.04

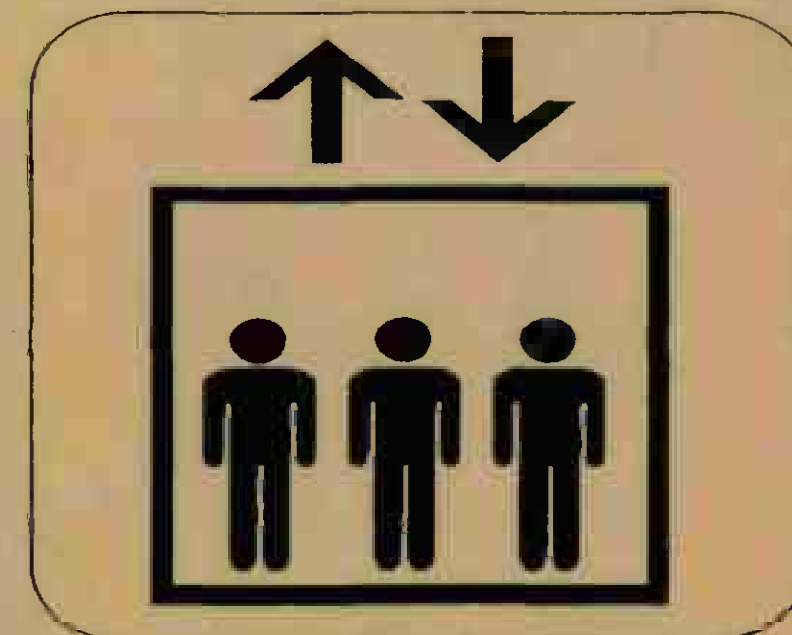


**Ulasan Ringkas**

**SURVEI PENDUDUK ANTAR SENSUS**

**( SUPAS 95 )**

**PROPINSI JAWA TIMUR**



304.6

WILDA  
Ind

**BPS** Biro Pusat Statistik

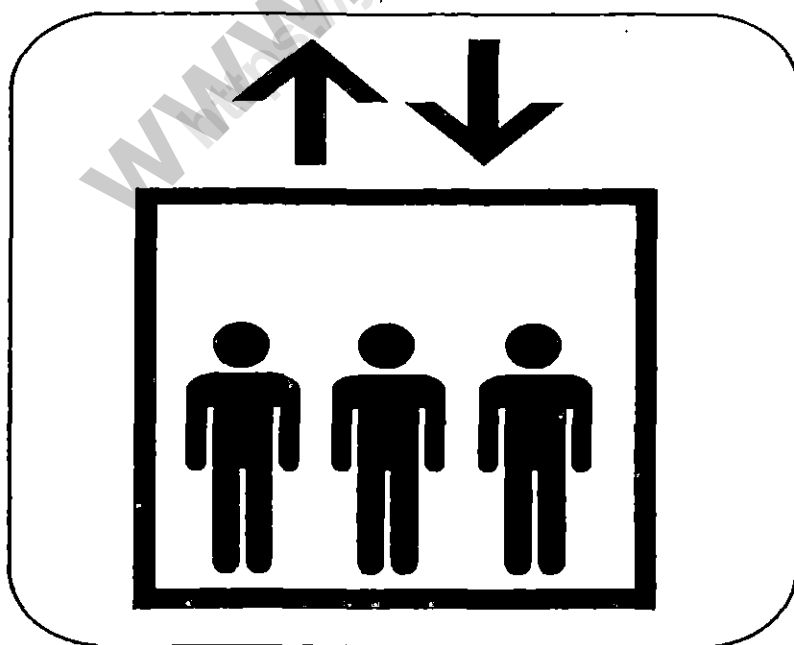
**KANTOR STATISTIK *BPS* PROPINSI JAWA TIMUR**

304.6  
Ula  
md

ISBN : 979.4877778  
35541.96.04

**Ulasan Ringkas**  
**SURVEI PENDUDUK ANTAR SENSUS**  
**( SUPAS 95 )**

**PROPINSI JAWA TIMUR**



KANTOR STATISTIK **BPS** PROPINSI JAWA TIMUR

## Kata Pengantar

Survei Penduduk Antar Sensus 1995 (SUPAS95) merupakan salah satu survei kependudukan yang menjadi andalan BPS untuk memenuhi kebutuhan data kependudukan dalam skala regional maupun nasional. Survei sejenis sudah tiga kali diselenggarakan di Jawa Timur. Pertama dilaksanakan pada tahun 1976, kedua pada tahun 1985. SUPAS yang ketiga pada tahun 1995 ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan data kependudukan antara Sensus Penduduk 1990 dan Sensus Penduduk tahun 2000.

Publikasi ini merupakan ringkasan yang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya sangat mendesak, sedangkan publikasi yang lebih rinci masih dalam penyelesaian. Dalam publikasi ini lebih banyak diketengahkan trend berbagai karakteristik penduduk sejak tahun 1971 sampai dengan 1995, dengan maksud agar isi buku ini lebih banyak berperan dalam berbagai perencanaan.

Kami sadari buku ini masih banyak kelemahannya namun semoga bermanfaat.

Surabaya, Nopember 1996.

KANTOR STATISTIK PROPINSI  
JAWA TIMUR  
Kepala,



**SOEWONDO HARDJOPAWIRO, MSc**  
NIP. 340000718

## DAFTAR ISI

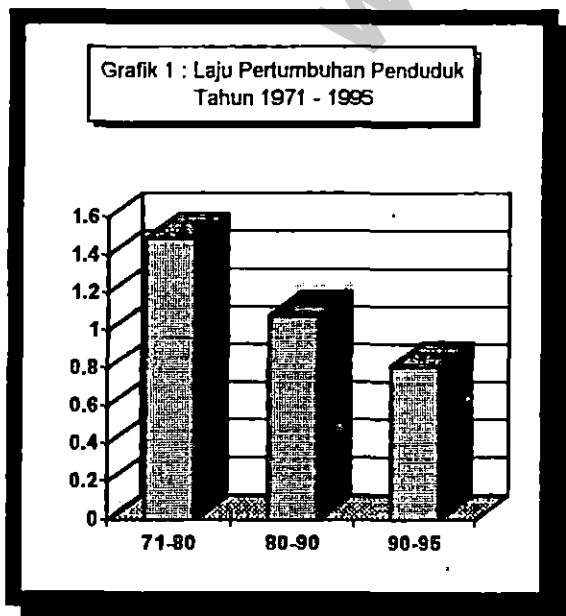
	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
Bab I      Pendahuluan .....	1
Bab II     Laju Pertumbuhan Penduduk .....	1-3
Bab III    Persebaran dan Kepadatan Penduduk .....	3-5
Bab IV     Susunan umur dan Jenis Kelamin .....	5-7
Bab V      Perkawinan dan Fertilitas .....	8-10
Bab VI     Bahasa dan Pendidikan .....	10-12
Bab VII    Angkatan Kerja .....	12-14
Bab VIII   Keadaan Tempat Tinggal .....	15-16
Bab IX     Penutup .....	16-17

## DAFTAR TABEL

Tabel	Penjelasan	Halaman
A	Penduduk menurut golongan umur dan jenis kelamin Tahun 1971, 1980, 1990, 1995.....	18
B	Penduduk menurut golongan umur Tahun 1971, 1980, 1990, 1995.....	19
C	Persentase wanita berumur 15-49 tahun yang belum kawin menurut golongan umur dan daerah kota/pedesaan tahun 1971, 1980, 1990 1995.....	20
D	Persentase penduduk berumur 10 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis menurut kelompok umur dan jenis kelamin tahun 1971, 1980, 1990, 1995.....	21
E	Persentase penduduk berumur 10 tahun keatas yang pernah sekolah menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan tahun 1971, 1980, 1990, 1995.....	22
F	Tingkat partisipasi angkatan kerja menurut golongan umur dan jenis kelamin tahun 1971, 1980, 1990, 1995 .....	23
G	Persentase penduduk yang pernah bekerja menurut lapangan Pekerjaan menurut Tahun 1971, 1980, 1990, 1995.....	24
H	Persentase penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan Tahun 1971, 1980, 1990, 1995 .....	25
I	Persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama Tahun 1971, 1980, 1990, 1995.....	26
J	Persentase penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu yang lalu menurut golongan umur dan jenis kelamin tahun 1971, 1980, 1990, 1995 .....	27
K	Persentase rumahtangga menurut penggunaan bahan bakar untuk memasak dan penerangan tahun 1971, 1980, 1990, 1995.....	28

## BAB I : PENDAHULUAN

Data yang akurat dan up-to-date tentang karakteristik, jumlah dan sebaran penduduk sangat dibutuhkan sebagai dasar pengambilan keputusan perencanaan pembangunan oleh kalangan pemerintah maupun perencanaan usaha oleh kalangan swasta. Pelaksanaan registrasi penduduk di Indonesia belum lagi sempurna, sehingga sensus penduduk kerap dijadikan sumber utama data kependudukan. Namun karena diadakan setiap 10 tahun sekali, data sensus penduduk dianggap kurang dapat memenuhi keperluan. Untuk itu dilaksanakan survei penduduk antar sensus (Supas) dipertengahan waktu antara dua sensus.



Supas 95 yang diadakan pada bulan Oktober 1995 yang lalu mencakup data statistik kelahiran, kematian, migrasi, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan, dan keterangan rumahtangga lainnya. Data Supas 95 ini sangat penting artinya bagi pemenuhan kebutuhan data kependudukan antara sensus penduduk 1990 dan sensus penduduk 2000 yang akan datang. Berikut ini adalah ulasan ringkas hasil Supas 1995 dibandingkan dengan hasil sensus penduduk sebelumnya.

Beberapa karakteristik penting yang bisa dilihat keterbandingannya sejak tahun 1971 antara lain : laju pertumbuhan penduduk, persentase penduduk menurut golongan umur, presentase wanita (15-49) tahun yang belum kawin, tingkat partisipasi angkatan kerja dan prosentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha.

## II. LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

Besarnya jumlah penduduk di Indonesia, sudah bukan merupakan masalah baru dalam pembangunan. Pengendalian

jumlah kelahiran terus diupayakan sebagai salah satu jalan keluar. Masalah kependudukan yang dihadapi dewasa ini adalah pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, struktur penduduk yang muda, persebaran penduduk belum merata dan kualitas penduduk relatif rendah.

Sejak awal Orde Baru Pemerintah sudah menyadari akan arti pentingnya pengendalian jumlah penduduk ini, jika tidak ada upaya pengendalian atau menekan laju pertumbuhannya, justru akan mengalami permasalahan. Karena pertumbuhan penduduk harus diimbangi dengan peningkatan penyediaan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja yang memadai. Program kependudukan yang berjalan selama ini adalah Keluarga Berencana (KB) dan Transmigrasi.

Jumlah absolut penduduk Propinsi Jawa Timur makin bertambah dari sekitar 25,508 juta pada tahun 1971 menjadi 29,169 juta pada tahun 1980, kemudian naik menjadi 32,488 juta pada tahun 1990 dan naik lagi menjadi 33,844 juta pada Tahun 1995. Ini berarti dalam kurun waktu

1971-1980 penduduk bertambah dengan kecepatan 1,49 persen per tahun, dalam kurun waktu 1980-1990 bertambah dengan kecepatan 1,08 persen per tahun dan kurun waktu 1990-1995 bertambah dengan kecepatan 0,81 persen pertahun.

Secara riil jumlah penduduk Jawa Timur terus bertambah, namun bila dilihat angka rata-rata pertumbuhan adalah semakin menurun. Pertumbuhan penduduk disebabkan oleh beberapa faktor yaitu ; fertilitas, mortalitas dan tingkat migrasi. Penurunan laju pertumbuhan di Jawa Timur ini terutama disebabkan oleh menurunnya tingkat fertilitas, sebagai akibat program KB yang diterapkan di Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan semakin menurunnya persentase penduduk berumur 0-4 tahun, yaitu tahun 1971 penduduk berumur 0-4 tahun adalah 14,65 persen terhadap total penduduk, tahun 1980 menjadi 12,00 persen, tahun 1990 turun menjadi 9,48 persen dan tahun 1995 turun lagi menjadi 8,99 persen.

Laju pertumbuhan penduduk periode 1990-1995 bervariasi antar

kabupaten/kotamadia. Laju pertumbuhan tertinggi adalah Kabupaten Sidoarjo yaitu sebesar 2,91 persen, sedangkan laju pertumbuhan terendah adalah di Kabupaten Magetan yaitu sebesar 0,07 persen.

Walau laju pertumbuhan penduduk di Jawa Timur yang mencapai 0,81 persen itu berada dibawah laju pertumbuhan penduduk nasional yaitu 1,66 persen, namun bagaimanapun juga tetap merupakan masalah. Dengan jumlah penduduk yang besar, meski laju pertumbuhan alami telah berhasil ditekan ke tingkat yang rendah, secara absolut pertambahan jumlah penduduk tetap berpengaruh pada penyediaan sarana dan prasarana fisik Jawa Timur.

Dari skala mikro, banyak anak memang masalah keluarga, dan hal tersebut bukan menjadi masalah apabila keluarga tersebut kebetulan orang mampu.

Tetapi dari segi makro, hal itu tetap menjadi masalah, karena pemerintah harus menyediakan fasilitas-fasilitas yang memadai, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Untuk daerah Kotamadia umumnya mempunyai laju pertumbuhan diatas 1,00 persen, hanya kotamadia Madiun saja yang dibawah 1,00 persen, yaitu 0,15 persen. Sementara untuk daerah Kabupaten hanya 5(lima) Kabupaten yang mempunyai laju pertumbuhan diatas 1,00 persen yaitu ; Kabupaten Pasuruan 1,41 persen, Kabupaten Sidoarjo 2,91 persen, Kabupaten Gresik 1,32 persen, Kabupaten Sampang 1,21 persen dan Kabupaten Pamekasan 1,23 persen.

Tabel 1: Penduduk Menurut Jenis kelamin 1971, 1980, 1990 dan 1995 ( x 1000 )

TAHUN	L	P	JEP
1971	12381,3	13127,1	25508,4
1980	14249,8	14919,2	29168,0
1990	15909,4	16578,4	32487,8
1995	16598,2	17245,8	33844,0

### III. PERSEBARAN DAN KEPADATAN PENDUDUK

Persebaran penduduk bukan semata-mata masalah perimbangan jumlah (kuantitas) penduduk menurut satuan luas tertentu saja (kepadatan penduduk), melainkan juga mencakup aspek-aspek kualitas



seperti daya dukung wilayah, baik dalam arti sosial ekonomi maupun fisik lingkungan. Dengan kata lain persebaran penduduk bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri atau suatu fenomena demografis semata, namun bersifat multidimensial.

Salah satu unsur penting yang erat kaitannya dengan persebaran adalah mobilitas penduduk. Perpindahan penduduk dari Jawa Timur ke wilayah-wilayah lain, mempunyai arti yang sangat penting. Selain dapat mengurangi kepadatan penduduk di Jawa Timur itu sendiri, dapat juga memenuhi kebutuhan tenaga kerja di wilayah lain, sebab potensi tenaga kerja dapat dimanfaatkan secara optimal. Persebaran penduduk menurut kabupaten/kotamadia adalah sbb :

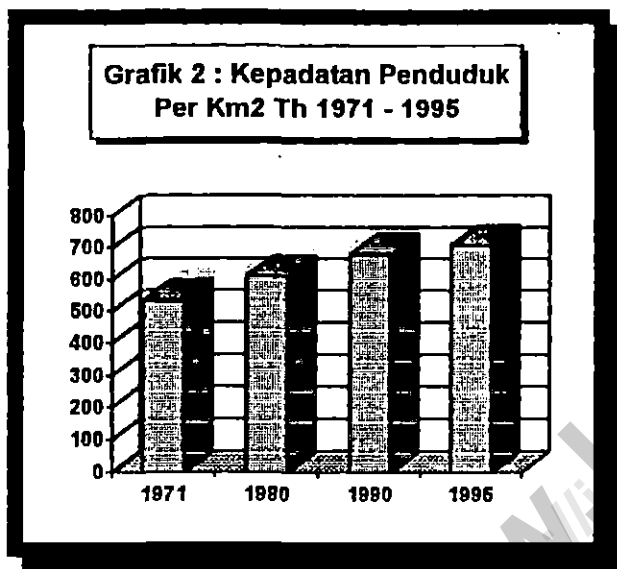
Kepadatan penduduk di Propinsi Jawa Timur pada tahun 1990 adalah sebesar 678 orang/km<sup>2</sup> dan menjadi 706 orang/km<sup>2</sup> pada tahun 1995. Karena jumlah penduduk kabupaten/kotamadia selalu bertambah, sedangkan luas wilayahnya tidak mengalami perubahan, maka kepadatan penduduk per kilometer persegi dari tahun ke tahun selalu meningkat.

Kotamadia Surabaya merupakan daerah dengan kepadatan tertinggi yaitu 9832 orang/km<sup>2</sup>, sedangkan Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah dengan kepadatan terendah, yaitu 255 orang/km<sup>2</sup>. Sebanyak 17 Kabupaten/Kotamadia mempunyai kepadatan penduduk lebih tinggi daripada kepadatan penduduk Propinsi.

Tingginya tingkat kepadatan di Kotamadia Surabaya antara lain disebabkan oleh adanya daya tarik dari kotamadia tersebut berupa tersedianya lapangan pekerjaan yang lebih baik dan adanya fasilitas-fasilitas lain yang relatif memadai seperti fasilitas pendidikan, rekreasi dan sebagainya.

Sementara di daerah asal yang umumnya daerah pedesaan lapangan pekerjaan yang tersedia sangatlah terbatas dengan adanya penyempitan lahan pertanian. Tersedianya upah yang relatif rendah di daerah pedesaan, akan mendorong penduduk Desa untuk pindah ke Kota. Bila dilihat dua angka kepadatan diatas, yaitu tertinggi 9.832 orang/km<sup>2</sup> dan terendah 255 orang/Km<sup>2</sup>, menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di Jawa Timur sangat tidak

merata. Daerah Kotamadia umumnya mempunyai kepadatan tinggi (diatas 2000 orang/Km<sup>2</sup>), dan sebaliknya di daerah pantai mempunyai kepadatan sangat rendah (dibawah 600 orang/Km<sup>2</sup>).



#### BAB IV : SUSUNAN UMUR DAN JENIS KELAMIN

Jumlah penduduk yang besar memang dapat dianggap sebagai salah satu modal bagi pembangunan, tetapi tidak berarti bahwa dengan jumlah penduduk besar akan menjamin berhasilnya suatu pembangunan.

Dari hasil SP 1990, Propinsi Jawa Timur adalah propinsi ke dua di

Indonesia yang jumlah penduduknya terbesar setelah Propinsi Jawa Barat. Namun hasil-hasil sensus sebelumnya Jawa Timur selalu berada pada urutan pertama.

Hasil Supas 1995 juga memperlihatkan hal yang sama bahwa Jawa Timur tetap mempunyai urutan kedua terbesar jumlah penduduknya yaitu sekitar 33,844 juta jiwa. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan sebesar 0,81 persen dalam jangka waktu lima tahun terakhir (1990-1995).

Persentase jumlah anak usia kurang dari 15 tahun pada tahun 1971 adalah se-besar 41,17 persen, tahun 1980 sebesar 36,55 persen, tahun 1990 sebesar 31,39 persen dan menjadi 29,55 persen pada tahun 1995. Apabila dilihat per daerah tingkat II tampak bahwa persentase jumlah anak usia dibawah 15 tahun yang tertinggi adalah di Kabupaten Sampang sebesar 30,81 persen, sedangkan persentase terendah adalah di Kotamadia Madiun sebesar 14,40 persen.

Persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) pada tahun 1971 adalah se-besar 56,34 persen, tahun 1980

sebesar 59,64 persen, tahun 1990 sebesar 63,78 persen dan menjadi 64,51 persen pada tahun 1995. Per-sentase jumlah penduduk usia 15-64 tahun yang tertinggi adalah di Kotamadia Surabaya sebesar 80,20 persen, sedangkan persentase terendah adalah di Kabupaten Sampang sebesar 65,08 persen.

Persentase penduduk usia 65 tahun ke atas pada tahun 1971 adalah sebesar 2,49 persen, tahun 1980 sebesar 3,81 persen, tahun 1990 sebesar 4,83 persen dan menjadi 5,94 persen pada tahun 1995. Persentase penduduk usia 65 tahun ke atas yang tertinggi adalah di Kabupaten Pacitan sebesar 10,11 persen, sedangkan persentase terendah adalah di Kabupaten Sidoarjo sebesar 3,27 persen.

Dari angka absolut maupun persentase jumlah penduduk usia di bawah 15 tahun menunjukkan penurunan yang cukup berarti dari tahun ke tahun. Penurunan penduduk kelompok umur tersebut merupakan cermin keberhasilan program keluarga berencana di Jawa Timur.

Melihat komposisi umur penduduk di atas ada kecenderungan bahwa

penduduk Jawa Timur sudah mulai mengarah ke penduduk usia tua, seperti yang diutarakan oleh Harto Nurdin (dasar-dasar Demografi tahun 1981) bahwa komposisi umur penduduk tua adalah :

- 0 - 14 < 30 persen
- 15 - 64 > 60 persen
- 65+ > 10 persen

Kita tahu bahwa penduduk kelompok umur < 15 tahun dan > 65 tahun adalah kelompok penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, sedangkan penduduk usia 15-64 tahun adalah kelompok penduduk produktif. Turunnya persentase penduduk kelompok umur < 15 tahun mengakibatkan turunnya pula angka beban tanggungan atau dependency ratio, meskipun untuk penduduk kelompok umur > 65 tahun yang juga menjadi tanggungan penduduk produktif mengalami kenaikan namun kenaikan tersebut tidak cukup berarti. Terlihat bahwa tahun 1971 angka beban tanggungan di Jawa Timur sebesar 77,4 persen, tahun 1980 sebesar 67,9 persen, tahun 1990 sebesar 56,8 persen dan dari hasil Supas 1995 turun menjadi 55,0 persen. Ini berarti bahwa pada tahun 1995

dari 100 penduduk usia produktif harus menanggung beban sebesar 55 penduduk usia tidak produktif.

Penurunan angka ketergantungan ini juga terjadi hampir diseluruh Daerah Tingkat II di Jawa Timur.

Tabel 2 : Peresentase Penduduk Menurut Kelompok umur tahun 1971, 1980, 1990 dan 1995

Tahun	15	15-64	65
1971	41,17	56,34	2,49
1980	36,55	59,64	3,81
1990	31,39	63,78	4,83
1995	29,55	64,51	5,94

Selain dilihat dari komposisi umur, banyaknya penduduk juga ditampilkan menurut komposisi jenis kelamin. Terlihat bahwa komposisi penduduk menurut jenis kelamin dari tahun ke tahun tidak menunjukkan perubahan yang cukup berarti. Persentase penduduk menurut jenis kelamin atau yang lebih dikenal dengan sebutan sex ratio (rasio jenis kelamin) angkanya selalu di bawah 100 persen. Ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk wanita selalu lebih banyak dari pada pen-

duduk laki-laki. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal, yaitu :

- Daya tahan hidup (survival) penduduk wanita lebih panjang dibandingkan penduduk laki-laki.
- Pada umumnya penduduk laki-laki kelompok umur tertentu lebih banyak yang melakukan migrasi (perpindahan).

Rasio jenis kelamin me ningkat dari 94,3 pada tahun 1971, menjadi 95,5 pada tahun 1980 dan naik menjadi 96,0 pada tahun 1990, kemudian naik lagi menjadi 96,2 pada tahun 1995. Rasio jenis kelamin yang tertinggi adalah di Kabupaten Pamekasan yaitu sebesar 105,3 sedangkan yang terendah adalah di Kotamadia Mojokerto yaitu sebesar 88,0. Ada 5(lima) Daerah Tingkat II yang mempunyai rasio jenis kelamin diatas 100 yaitu Kabupaten Trenggalek (100,4); Kabupaten Malang (101,5); Kabupaten Lamongan (100,0); Kabupaten Pamekasan (105,3); dan Kotamadia Probolinggo (103,2). Tingginya rasio jenis kelamin didaerah ini disebabkan karena tingginya penduduk laki-laki kelompok umur dibawah 15 tahun.

## BAB V : PERKAWINAN DAN FERTILITAS

Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi upaya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak, mengingat bahwa segala jerih payah penduduk yang dicapai dalam pembangunan cenderung akan terhisap oleh besarnya jumlah penduduk karena pertumbuhan yang masih pesat.

Diantara ketiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, kelahiran merupakan faktor yang sangat menentukan.

Adanya kelahiran tidak dapat dipungkiri erat kaitannya dengan perkawinan. Umur perkawinan pertama dianggap sebagai indikator mulainya seorang wanita mempunyai resiko melahirkan anak. Undang-undang pokok perkawinan tahun 1974 menetapkan bahwa batas terendah umur perkawinan bagi penduduk wanita pada umur 16 tahun (tepatnya yang dianjurkan oleh undang-undang perkawinan tahun 1974 batasannya 19 tahun).

Umur perkawinan pertama sangat dipengaruhi oleh variabel-variabel

latar belakang yang kompleks, misalnya agama, pendidikan, tempat tinggal, pekerjaan dan faktor sosial ekonomi lainnya. Seperti yang diutarakan Soeraji (1979) dalam penelitiannya bahwa umur perkawinan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang. Jika dibandingkan dengan pengaruh faktor-faktor lainnya ternyata pendidikan merupakan faktor yang terkuat pengaruhnya.

Umur perkawinan pertama wanita di Propinsi Jawa Timur meningkat sejak tahun 1971 sampai dengan 1990 dari 18,9 pada tahun 1971 menjadi 19,6 pada tahun 1980 dan naik menjadi 21,3 tahun 1990, lalu turun menjadi 20,7 pada tahun 1995.

Dari gambaran di atas terlihat bahwa dari tahun ke tahun usia perkawinan penduduk Jawa Timur semakin tinggi, walau pada tahun 1995 ada sedikit penurunan. Tingginya umur perkawinan pertama penduduk wanita di Jawa Timur ini merupakan salah satu dampak akibat semakin meningkatnya tingkat pendidikan.

Tabel 3 : Rata-Rata Umur Kawin Pertama  
1971, 1980, 1990 dan 1995

TAHUN	K	P	K+P
1971	21,3	18,4	18,9
1980	21,9	19,0	19,6
1990	23,8	20,1	21,3
1995	23,1	19,6	20,7

Seperti yang diungkapkan di atas bahwa jumlah penduduk Jawa Timur pada tahun 1995 sebesar 33,844 juta jiwa, dimana 17,246 juta jiwa adalah penduduk perempuan. Dari jumlah tersebut sekitar 47,60 persen berstatus kawin.

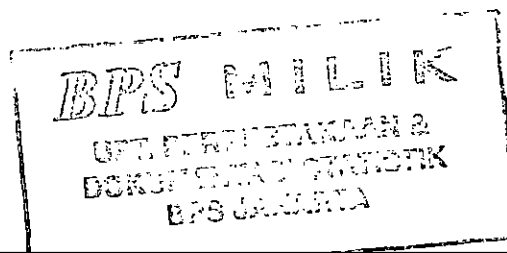
Selama kurun waktu 1990-1995, jumlah wanita pa-sangan usia subur (PUS) telah meningkat sebesar 8,83 persen, yaitu dari 6,128 juta pasangan pada tahun 1990 menjadi 6,668 juta pasangan pada tahun 1995. Jika PUS dibandingkan dengan wanita usia subur (15-49), proporsi wanita PUS mengalami kenaikan sebesar 3,19 persen pada kurun waktu yang sama.

Lamanya seorang wanita melangsungkan perkawinan antara lain ditentukan oleh umur pada saat melakukan perkawinan pertamanya. Lamanya perkawinan pada wanita yang kawin muda tentu akan lebih panjang dibandingkan

mereka yang kawin berumur lebih tua. Dengan demikian masa reproduksi akan lebih panjang pada mereka yang mempunyai umur perkawinan lebih muda. Ini berarti umur perkawinan pertama mempunyai hubungan negatif dengan kelahiran, artinya semakin tinggi umur perkawinan maka akan semakin kecil jumlah anak yang dilahirkan.

Anak lahir hidup (ALH) atau fertilitas adalah jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita pada jangka waktu tertentu. Sedangkan rata-rata anak lahir hidup (paritas), angkanya didapat dengan cara menghitung jumlah anak yang dilahirkan hidup dibagi dengan jumlah wanita usia produktif (15-49 tahun).

Hasil SP80, SP90 dan SUPAS95 menunjukkan bahwa rata-rata banyaknya anak yang pernah dilahirkan hidup per wanita adalah 2,41; 2,16 dan 1,68 hal ini mencerminkan telah terjadinya penurunan ALH selama kurun waktu 5 tahun terakhir sebesar 22,22 persen. Berdasarkan diferensiasi daerah, penurunan terbesar terjadi di daerah perkotaan yaitu sebesar



22,56 persen. Sementara penurunan ALH didaerah pedesaan sebesar 20,54 persen.

Variasi rata-rata ALH menurut kabupaten/kotamadia pada tahun 1995 tidak mengalami perubahan yang signifikan dibanding dengan tahun 1990. ALH tertinggi pada tahun 1995 terjadi di Kabupaten Sampang yaitu sebesar 2,36 dan terendah di Kotamadia Surabaya, sebesar 1,32.

Secara umum anak yang lahir hidup didaerah Kotamadia lebih rendah dibandingkan dengan didaerah Kabupaten. Untuk daerah Kotamadia berkisar antara 1,32 s.d 1,69 sedangkan untuk daerah Kabupaten antara 1,53 s.d 2,36. Kondisi Kabupaten-kabupaten di daerah Pulau Madura tetap seperti sebelumnya yaitu menempati urutan paling tinggi diantara Kabupaten di daerah lainnya.

Bila dipilah menurut daerah Kota dan Pedesaan, ternyata jumlah anak lahir hidup didaerah Kota lebih kecil dibandingkan dengan daerah Pedesaan, yaitu di Kota 1,51 dan di pedesaan 1,78. satu hal yang menarik untuk daerah Kota, ternyata

Kabupaten Banyuwangi mempunyai angka cukup tinggi (2,01)

Tabel 4 : Rata-Rata Anak Yang Dilahirkan Per Wanita 1980, 1990 dan 1995

TAHUN	K	P	K+P
1980	2,16	2,47	2,41
1990	1,95	2,24	2,16
1995	1,51	1,78	1,68

## BAB VI : BAHASA DAN PENDIDIKAN

Bahasa adalah sarana komunikasi antar penduduk. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali digunakan oleh ibu responden untuk berkomunikasi dengan responden.

Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa mempunyai banyak ragam bahasa. Namun untuk mewujudkan kesatuan bangsa maka pada tahun 1928 dalam kongres pemuda yang terkenal dengan "sumpah pemuda" nya dicanangkan bahwa meskipun Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa namun tetap merupakan satu tanah air, bahasa dan bangsa yaitu Indonesia.

Jawa Timur adalah salah satu propinsi di Indonesia terdiri dari 37 daerah tingkat II, 8 buah diantaranya adalah kotamadia dan sisanya kabupaten. Dari hasil Supas95, terlihat bahwa bahasa ibu yang terbanyak di-pakai oleh penduduk propinsi ini adalah Bahasa Jawa (74,77 persen). Sementara bahasa ibu yang paling sedikit digunakan adalah Bahasa Bugis (0,01 persen).

Kemampuan dan penguasaan terhadap Bahasa Indonesia memberi peluang lebih besar untuk dapat saling berinteraksi, berkomunikasi dan beradaptasi sehingga mempermudah keakraban pergaulan antar sesama bangsa khususnya bangsa Indonesia. Selain daripada itu kemampuan berbahasa Indonesia juga dijadikan indikator mengukur kualitas manusia Indonesia. Dilihat dari segi pendidikan, penguasaan Bahasa Indonesia juga akan memperlancar proses belajar dan setidaknya dinilai telah mengenal pendidikan.

Kemampuan berbahasa Indonesia di propinsi ini meningkat dari 50,9 persen pada tahun 1980 menjadi 74,6 persen pada tahun 1990 dan menjadi 78,43 persen pada

tahun 1995. Prosentase tertinggi terjadi di Kotamadia Surabaya yaitu sebesar 96,99 persen dan terendah di Kabupaten Sumenep sebesar 55,94 persen.

Buta aksara merupakan salah satu kendala dalam upaya membangun manusia seutuhnya, sebaliknya bagi masyarakat yang pandai baca tulis (melek huruf) berguna untuk kepentingan negara dan masyarakat.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Jawa Timur untuk memberantas buta huruf. Pemasarakan program wajib belajar dan pengenalan paket-paket pendidikan setingkat sekolah dasar terus dikembangkan di setiap unit terkecil administrasi pemerintahan.

Sejak tahun 1971 terjadi kenaikan jumlah penduduk yang dapat membaca dan menulis, yaitu dari 52,85% pada tahun 1971, 63,14% pada tahun 1980, naik menjadi 77,28% pada tahun 1990 dan naik lagi menjadi 79,77% pada tahun 1995.



Tabel 5 : Prosentase Penduduk Yang Dapat Baca Tulis 1971, 1980, 1990 dan 1995

TAHUN	L	P	L+P
1971	85,55	41,25	52,85
1980	75,71	53,30	63,14
1990	85,04	70,01	77,28
1995	87,31	72,67	79,77

Pendidikan seringkali dijadikan indikator apakah masyarakat sudah maju atau belum. Pendidikan juga merupakan salah satu upaya pengembangan sumber daya manusia. Dalam 25 tahun pembangunan jangka panjang I kebijakan dibidang pendidikan telah meningkatkan pendidikan penduduk Indonesia pada umumnya, khususnya penduduk Propinsi Jawa Timur. Tampaknya kebijakan program wajib belajar se-kolah dasar yang dicanangkan sejak tahun 1983 telah mendorong keberhasilan tersebut.

Sejak tahun 1971 hingga 1980, persentase anak usia 5 tahun ke atas yang masih sekolah telah meningkat secara graduasi dari 17,6 persen pada tahun 1971 menjadi 24,2 persen pada tahun 1980. Namun setelah itu terus menurun yaitu menjadi 24,0 persen pada tahun 1990 dan

turun lagi menjadi 23,61 persen pada tahun 1995. Namun pada kelompok umur 7 - 12 tahun terjadi kenaikan.

Tabel 6 : Prosentase Penduduk Yang Masih Sekolah 1971, 1980, 1990 dan 1995

TAHUN	L	P	L+P
1971	20,21	15,13	17,6
1980	26,76	21,81	24,2
1990	25,99	22,11	24,0
1995	25,56	21,75	23,61

Indikator pendidikan lain yang penting adalah persentase penduduk 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang tidak/belum tamat SD secara umum terus menurun sejak tahun 1971. Pada tahun 1971 penduduk dalam kategori ini sebesar 56,45 persen, dan kemudian naik menjadi 57,50 persen pada tahun 1980, kemudian turun menjadi 36,59 persen pada tahun 1990 dan turun lagi menjadi 34,29 persen di tahun 1995.

## BAB VII : ANGKATAN KERJA

Jumlah tenaga kerja semakin bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah

penduduk, namun dilain pihak lapangan pekerjaan terbatas. Ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dengan kemampuan menyerap jumlah tenaga kerja mempunyai pengaruh buruk terhadap kelangsungan pembangunan.

Tenaga kerja atau penduduk usia kerja adalah penduduk berusia 10 tahun ke atas. Tenaga kerja terdiri dari : *angkatan kerja dan bukan angkatan kerja*.

Angkatan kerja adalah penduduk usia 10 tahun ke atas yang kegiatan terbanyaknya bekerja atau mencari pekerjaan. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah penduduk usia 10 tahun ke atas yang kegiatan terbanyaknya sekolah, mengurus rumahtangga atau lainnya. Untuk gambaran terinci mengenai angkatan kerja dapat dilihat di bawah ini.

Selama kurun waktu 1980-1995 jumlah Angkatan Kerja Propinsi Jawa Timur mengalami perubahan yang cukup besar. Pada tahun 1980 penduduk yang termasuk angkatan kerja berjumlah 11,558 juta (52,97 persen), tahun 1990 meningkat menjadi 14,728 juta (57,26 persen) dan tahun 1995 menjadi 16,358 juta (59,39 persen). Jadi setiap tahunnya angkatan kerja

bertambah 0,43 persen. Sejalan dengan bertambahnya angkatan kerja, secara absolut penduduk yang bekerja juga meningkat. Dari 11,395 juta (98,59 persen) pada tahun 1980 menjadi 14,332 juta (97,31 persen) pada tahun 1990 dan 15,571 juta (95,18 persen) pada tahun 1995.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan tenaga kerja. TPAK menurut umur, terutama wanita dalam 15 tahun terakhir meningkat pesat. Kenaikan ini terjadi pada setiap kelompok umur kecuali pada umur 10-14 tahun, karena sebagian besar dari kelompok umur ini bersekolah dan persentasenya terus meningkat.

Tabel 7 : TPAK Jawa Timur 1971, 1980, 1990 dan 1995

TAHUN	L	P	L+P
1971	73,68	36,97	54,50
1980	71,65	35,60	52,97
1990	73,94	41,63	57,26
1995	75,39	44,29	59,39

Pembangunan dalam bidang ekonomi mempunyai pengaruh yang tidak kecil terhadap komposisi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha. Pertanian

yang mempunyai peranan besar dalam pendapatan regional Jawa Timur dan mempunyai peranan besar dalam penyerapan tenaga kerja semakin lama peranannya semakin tergeser oleh sektor non pertanian. Pergeseran ini antara lain disebabkan oleh :

- Semakin menciutnya lahan pertanian yang tersedia.
- Sektor non pertanian seperti : sektor industri, dapat memberikan pendapatan yang relatif lebih baik.

Gejala pergeseran tersebut dapat dilihat dari turunnya penduduk yang bekerja di sektor pertanian.

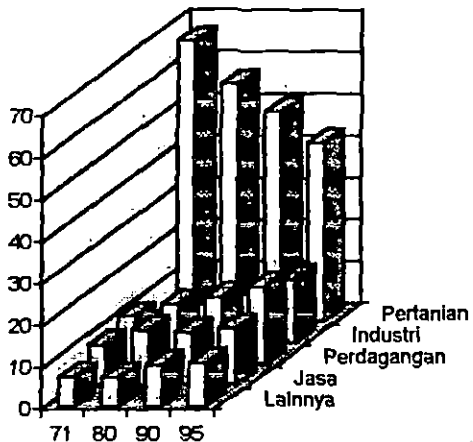
Penduduk Jawa Timur yang bekerja di sektor pertanian turun dari 56,56 persen pada tahun 1980 turun menjadi 50,05 persen pada tahun 1990 dan turun lagi menjadi 42,52 persen pada tahun 1995. Sebaliknya untuk sektor non pertanian seperti industri, perdagangan dan jasa cenderung meningkat.

Sejalan dengan perubahan susunan lapangan usaha, susunan jabatan juga mengalami perubahan yang tidak kecil. Petani turun dari 65,15 persen pada tahun

1971 menjadi 56,41 persen pada tahun 1980, kemudian 50,13 persen pada tahun 1990 dan turun lagi menjadi 42,35 persen pada tahun 1995. Tenaga penjualan naik dari 11,24 persen pada tahun 1971 menjadi 14,17 persen pada tahun 1980, lalu naik menjadi 15,19 persen pada tahun 1990 dan naik lagi menjadi 16,94 persen pada tahun 1995. Tenaga produksi dan operator alat pengangkutan naik dari 9,45 persen pada tahun 1971, kemudian 18,41 persen pada tahun 1980, lalu naik menjadi 22,42 persen pada tahun 1990, dan naik lagi menjadi 27,73 persen tahun 1995.

Persentase penduduk yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan berusaha dengan dibantu pekerja keluarga (buruh tidak dibayar) mengalami penurunan dari 48,48 persen pada tahun 1980 menjadi 42,73 persen pada tahun 1990 kemudian naik menjadi 43,85 persen pada tahun 1995. Mereka yang bekerja sebagai buruh meningkat dari 32,15 persen tahun 1980 menjadi 37,42 persen pada tahun 1990, lalu turun menjadi 36,08 persen pada tahun 1995.

**Grafik 3 : Penduduk Yg Bekerja Menurut Sektor Th 71 - 95**



Lainnya  
 Perdagangan  
 Pertanian
  Jasa  
 Industri

## BAB VIII : KEADAAN TEMPAT TINGGAL

Kondisi tempat tinggal kerap dikaitkan dengan kondisi kesehatan namun juga dapat dipakai untuk mengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga. Keberadaan sumber air minum misalnya, bisa mencerminkan tingkat kesejahteraan alam,

ekonomi dan pengetahuan dari penduduk suatu wilayah.

Hasil Supas 1995 menunjukkan bahwa di Propinsi Jawa Timur, sumber air minum/memasak yang paling banyak digunakan oleh rumah tangga adalah sumur (54,47 persen) disusul oleh leding (17,27 persen). Untuk mandi dan mencuci, sumber air yang paling banyak digunakan adalah sumur (52,52 persen) dan sumur pompa (13,22 persen) Kondisi ini tampaknya agak berbeda dengan kondisi pada tahun 1990 : dimana sumber air minum/memasak adalah sumur (60,68 persen) dan mata air (13,63 persen) sementara untuk mandi dan mencuci sumber air yang umumnya digunakan adalah sumur (55,47 persen) dan sungai (16,05 persen).

Pada tahun 1995, penggunaan sumur dan leding sebagai sumber air minum/memasak hampir berlaku umum pada kebanyakan kabupaten/kotamadia di Jawa Timur. Namun masih ada 5 (lima) Kabupaten yang juga menggunakan air hujan sebagai sumber air minum, yaitu Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik.

Persentase rumahtangga yang menggunakan air leding sebagai sumber air minum/memasak mengalami kenaikan dari 13,55 persen pada tahun 1990 menjadi 17,27 persen pada tahun 1995. Kenaikan terutama sekali disebabkan oleh kenaikan yang cukup menyolok di daerah pedesaan : mulai dari 4,20 pada tahun 1990 menjadi 5,60 persen pada tahun 1995.

Rumahtangga yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi penerangan menggambarkan kemampuan ekonomi rumahtangga tersebut. Disamping terbatasnya fasilitas listrik PLN, terutama di pedesaan, sampai saat ini tarif listrik masih dirasakan relatif mahal sehingga hanya rumahtangga yang berpenghasilan cukup yang mampu memanfaatkan jasa PLN. Di Propinsi Jawa Timur persentase rumahtangga yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan pada umumnya meningkat yaitu dari 45,77 persen pada tahun 1990 menjadi 75,63 persen pada tahun 1995. Penggunaan jamban disamping mencerminkan kepedulian terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan juga menggambarkan tingkat pengetahuan yang erat kaitannya

dengan tingkat kesejahteraan ekonomi suatu rumahtangga. Jamban yang dianggap memenuhi kriteria kesehatan adalah jamban yang menggunakan tangki septik. Lebih baik lagi jika jamban dengan tangki septik ini adalah jamban yang digunakan sendiri oleh rumahtangga tersebut.

Di Propinsi Jawa Timur pada umumnya telah terjadi kenaikan persentase rumah-tangga yang menggunakan jamban sendiri dengan tangki septik, yakni dari 14,45 persen pada tahun 1990 menjadi 19,07 persen pada tahun 1995.

## **BAB IX : PENUTUP**

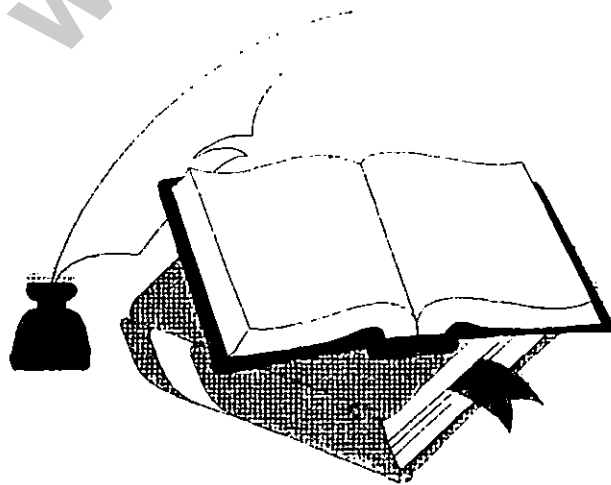
Ulasan ringkas ini mencoba memberikan gambaran umum yang terjadi pada kurun waktu 1970 - 1995, terutama tahun 1990 - 1995. Hanya sebagian kecil dari tren kependudukan yang diuraikan disini. Informasi yang lebih luas bisa didapatkan pada publikasi hasil Supas 1995.

Ada 4 (empat) keunikan data Supas 1995 yang perlu diketahui pengguna data. Pertama, data perpindahan penduduk dicakup lebih lengkap pada Supas95,

terutama data urbanisasi. Supas 1995 kali ini dapat mengukur perubahan penduduk perkotaan yang disebabkan oleh perubahan status daerah dari perdesaan ke perkotaan, hal yang tidak terkuak pada sensus atau survei sebelumnya. Yang kedua, pengukuran tingkat kelahiran dilakukan pada wanita yang berumur 10-54 tahun, berbeda dengan sensus atau survei sebelumnya yang mengukur tingkat kelahiran hanya pada wanita yang berumur 15-49 tahun. Yang ketiga, daftar pertanyaan Sakernas telah dicakup seluruhnya pada Supas 1995,

sehingga untuk 1995 Sakernas tidak diselenggarakan lagi secara tersendiri. Yang keempat, seperti biasanya, beberapa data hasil Supas 1995 akan dijadikan sebagai parameter dasar untuk penghitungan proyeksi. Karena Supas 1995 mencakup keseluruhan daftar pertanyaan Sakernas, maka hasil Supas 1995 juga dipakai untuk penghitungan proyeksi angkatan kerja. Khusus untuk kelahiran dan kematian, estimasi akan dilakukan sampai tingkat propinsi dan jika memungkinkan akan dilakukan sampai tingkat kabupaten/kotamadia.

# LAMPIRAN - LABEL



**TABEL A : PENDUDUK MENURUT GOLONGAN UMUR  
TAHUN 1971, 1980, 1990, 1995 ( X 1000 )**

Umur	1971	1980	1990	1995
1	2	3	4	5
0-4	3.736,6	3.499,4	3.081,4	3.043,2
5-9	3.873,6	3.849,1	3.684,2	3.257,9
10-14	2.890,2	3.309,4	3.434,4	3.698,5
15-19	2.264,6	3.002,1	3.285,1	3.108,0
20-24	1.596,7	2.541,0	2.909,6	2.804,5
25-29	1.976,9	2.349,8	2.976,3	2.771,9
30-34	1.834,1	1.710,9	2.551,8	2.766,9
35-39	1.975,8	1.817,2	2.196,2	2.668,1
40-44	1.498,5	1.658,1	1.616,8	2.169,1
45-49	1.168,4	1.434,6	1.582,6	1.610,4
50-54	925,6	1.259,7	1.449,1	1.415,9
55-59	564,5	824,9	1.124,2	1.328,0
60-64	567,1	767,8	1.029,5	1.191,2
65-69	260,3	404,3	644,2	848,9
70-74	223,8	371,0	466,9	604,1
75+	151,8	365,6	454,4	557,5
TT	0,0	4,2	1,1	0,0
<b>JUMLAH</b>	<b>25.508,4</b>	<b>29.169,0</b>	<b>32.487,8</b>	<b>33.844,0</b>



**TABEL . B : PROSENTASE PENDUDUK MENURUT GOLONGAN UMUR  
TAHUN 1971, 1980, 1990, 1995**

<b>UMUR</b>	<b>1971</b>	<b>1980</b>	<b>1990</b>	<b>1995</b>
1	2	3	4	5
0-4	14,65	12,00	9,48	8,99
5-9	15,19	13,20	11,34	9,63
10-14	11,33	11,35	10,57	10,93
15-19	8,88	10,29	10,11	9,18
20-24	6,26	8,71	8,96	8,29
25-29	7,75	8,06	9,16	8,19
30-34	7,19	5,87	7,85	8,18
35-39	7,75	6,23	6,76	7,88
40-44	5,87	5,68	4,98	6,41
45-49	4,58	4,92	4,87	4,76
50-54	3,63	4,32	4,46	4,18
55-59	2,21	2,83	3,46	3,92
60-64	2,22	2,63	3,17	3,52
65-69	1,02	1,39	1,98	2,51
70-74	0,88	1,27	1,44	1,78
75+	0,60	1,25	1,40	1,65
Terjawab	0,00	0,01	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**TABEL C : PENSENTASE WANITA BERUMUR 15-49 TAHUN  
YANG BELUM KAWIN MENURUT GOLONGAN UMUR  
TAHUN 1971, 1980,1990, 1995**

<b>Umur</b>	<b>1971</b>	<b>1980</b>	<b>1990</b>	<b>1995</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
15 - 19	54,96	63,94	78,12	78,28
20 - 24	14,53	17,55	31,18	32,96
25 - 29	3,62	5,38	8,95	11,48
30 - 34	1,49	2,34	3,27	3,85
35 - 39	1,00	1,37	2,02	1,92
40 - 44	0,94	1,07	1,52	1,59
45 - 49	0,62	0,89	1,01	1,51
<b>Jumlah 15-44</b>	<b>13,90</b>	<b>19,46</b>	<b>24,86</b>	<b>23,42</b>
<b>Jumlah 15-49</b>	<b>12,76</b>	<b>17,64</b>	<b>22,61</b>	<b>21,51</b>

**TABEL D : PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KEATAS YANG  
DAPAT MEMBACA DAN MENULIS MENURUT KELOMPOK UMUR  
TAHUN 1971,1980,1990, 1995**

UMUR	1971	1980	1990	1995
1	2	3	4	5
10 -14	78,71	88,72	97,76	98,07
15-19	78,56	83,67	97,01	97,55
20-24	72,10	78,57	93,07	96,11
25-29	59,28	73,52	86,76	91,20
30-34	46,79	66,13	81,93	85,60
35-39	40,52	57,54	77,79	81,24
40-44	34,19	45,32	68,81	77,83
45-49	31,85	39,82	61,92	73,26
50+	20,03	27,63	41,64	45,19
Tak Terjawab	-	35,80	49,07	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>52,85</b>	<b>63,14</b>	<b>77,28</b>	<b>79,77</b>

**TABEL. E : PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KEATAS YANG  
PERNAH SEKOLAH MENURUT PENDIDIKAN TERTINGGI YANG  
DITAMATKAN TAHUN 1971, 1980,1990, 1995**

<b>PENDIDIKAN</b>	<b>1971</b>	<b>1980</b>	<b>1990</b>	<b>1995</b>
1	2	3	4	5
Tidak/Belum Tamat SD	56,45	57,50	36,59	34,29
Sekolah Dasar	33,57	29,45	38,91	37,12
S.L.P Umum	4,99	6,02	11,38	12,49
S.L.P Kejuruan	1,79	1,43	1,08	1,05
S.L.A Umum	1,52	2,24	6,24	7,75
S.L.A Kejuruan	1,25	2,83	4,24	5,02
Diploma I/II	-	-	0,22	0,26
Akademi	0,21	0,27	0,48	0,57
Universitas	0,22	0,23	0,86	1,45
Tak Terjawab	-	0,03	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**TABEL. F : TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA MENURUT  
GOLONGAN UMUR TAHUN 1971, 1980,1990, 1995**

<b>PENDIDIKAN</b>	<b>1971</b>	<b>1980</b>	<b>1990</b>	<b>1995</b>
1	2	3	4	5
10-14	17,98	13,09	10,45	9,62
15-19	43,20	42,12	41,39	43,33
20-24	54,83	56,08	60,99	65,72
25-29	60,94	65,66	70,12	72,83
30-34	65,90	68,79	74,55	76,19
35-39	70,36	70,69	77,57	79,03
40-44	72,77	70,94	77,16	81,18
45-49	73,34	71,57	76,03	79,41
50-54	69,64	69,06	73,28	77,39
55-59	65,96	65,27	68,91	69,11
60-64	57,85	55,06	61,00	59,93
65+	44,84	34,78	40,11	40,29
Tak Terjawab	0,00	31,39	34,86	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>54.50</b>	<b>52.97</b>	<b>57.26</b>	<b>59.39</b>

**TABEL. G : PERSENTASE PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT  
LAPANGAN PEKERJAAN TAHUN 1971, 1980,1990, 1995**

LAPANGAN PEKERJAAN	1971	1980	1990	1995
1	2	3	4	5
1. Pertanian	66,67	56,56	50,05	42,52
2. Pertambangan & Penggalian	0,05	0,52	0,86	0,77
3. Industri	5,55	9,23	11,78	15,09
4. Listrik, Gas dan Air	0,06	0,11	0,16	0,25
5. Bangunan	1,16	2,75	3,61	4,50
6. Perdagangan	11,17	14,15	15,76	18,43
7. Angkutan & Komunikasi	1,93	2,68	3,63	4,16
8. Keuangan	0,13	0,40	0,64	0,71
9. Jasa-jasa	9,59	13,11	12,48	13,55
10. Kegiatan Lain	3,70	0,02	0,18	0,00
11. Tak Terjawab	0,00	0,47	0,85	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**TABEL. H : PERSENTASE PENDUDUK YANG BEKERJA  
MENURUT JENIS TH 1971, 1980, 1990, 1995**

<b>JENIS PEKERJAAN</b>	<b>1971</b>	<b>1980</b>	<b>1990</b>	<b>1995</b>
1	2	3	4	5
1. Profesional, Teknisi	1,62	2,33	2,84	3,67
2. Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan	0,32	0,06	0,14	0,31
3. Tata Usaha	2,71	2,73	3,73	3,87
4. Penjualan	11,24	14,17	15,59	16,94
5. Jasa-jasa	4,50	4,55	4,44	4,73
6. Petani	65,15	56,41	50,13	42,35
7. Produksi dan Operator Alat pengangkutan	9,45	18,41	22,42	27,73
8. Lain-lain	5,01	0,67	0,31	0,39
9. Tak terjawab	0,00	0,66	0,40	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**TABEL. I : PERSENTASE PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN UTAMA TH 1980, 1990, 1995**

<b>STATUS PEKERJAAN UTAMA</b>	<b>1980</b>	<b>1990</b>	<b>1995</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Berusaha Sendiri	25,32	20,20	25,49
Berusaha Dibantu Art	23,16	22,53	18,36
Berusaha dengan buruh tetap	1,40	1,40	1,40
Buruh (Karyawan)	32,15	37,42	36,08
Pekerja Keluarga	17,59	18,23	18,67
Tidak Terjawab	0,37	0,22	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



**TABEL. J : PERSENTASE PENDUDUK YANG BEKERJA KURANG DARI 35 JAM SELAMA SEMINGGU YANG LALU MENURUT GOLONGAN UMUR TAHUN 1980, 1990, 1995**

UMUR	1980	1990	1995
1	2	3	4
10-14	57,56	68,55	82,94
15-19	34,90	41,91	48,05
20-24	29,02	32,43	35,07
25-29	27,34	30,73	32,94
30-34	28,47	30,10	31,96
35-39	28,74	30,49	32,85
40-44	29,66	32,99	34,39
45-49	30,42	34,73	36,88
50-54	31,94	37,01	39,39
55-59	33,70	40,43	45,98
60-64	37,40	44,15	50,50
65+	43,64	50,39	55,53
Tak Terjawab	23,52	15,71	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>31,84</b>	<b>35,60</b>	<b>38,82</b>

**TABEL. K : PERSENTASE RUMAHTANGGA MENURUT PENGGUNAAN  
BAHAN BAKAR UANTUK MEMASAK DAN PENERANGAN  
TAHUN 1971, 1980, 1990, 1995**

<b>BAHAN BAKAR</b>	<b>1971</b>	<b>1980</b>	<b>1990</b>	<b>1995</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Untuk Penerangan</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Listrik	5,80	12,11	45,77	75,63
Petromak	0,00	30,81	12,06	4,25
Minyak Tanah	94,07	55,94	41,78	20,07
Lainnya	0,13	0,91	0,37	0,05
Tak Terjawab	0,00	0,24	0,02	0,00
<b>Untuk Memasak</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Listrik	0,09	0,20	0,54	0,64
Gas	0,03	0,43	1,30	2,57
Minyak Tanah	10,54	23,25	22,31	29,25
Kayu, arang	88,91	75,67	75,31	66,57
Lainnya	0,43	0,24	0,50	0,98
Tak Terjawab	0,00	0,22	0,04	0,00